

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI



OLEH :

SUMARDIN
NIM 20092025029

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2013**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA
PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PEMERIKSAAN
ALAT-ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH :
SUMARDIN
NIM 20092025029

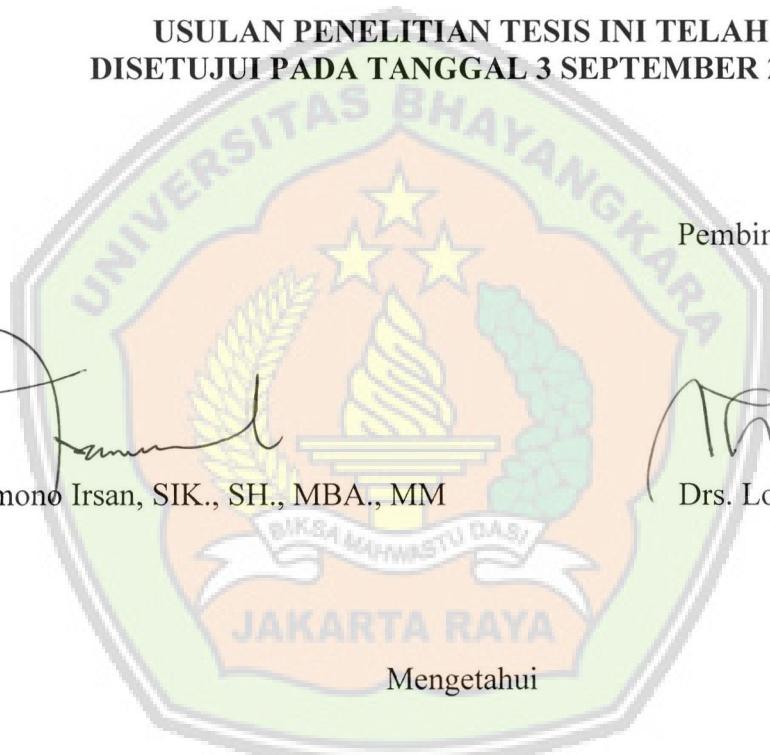
**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2013**

Pembimbing I

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II

Drs. Logan Siagian, MH



Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 3 September 2013

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/005/VIII/2013/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Dr. Boy Nurdin, SH., MH

2. Dr. Adityawarman, SH., MH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN NO. 12967/D/T/K-III/2012**

PERSETUJUAN TESIS

NAMA : SUMARDIN
NIM : 20092025029
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI



MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat **Allah SWT** dan Shalawat beruntaikan salam kepada **Nabi Muhammad SAW**, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI**” guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku Ayahanda H. Masusung Gau dan Ibunda Raiyah atas doa dan kasih sayangnya, Mahkota Hidupku my wife Lisa Aryanti di Malang Jawa Timur, Putraku tersayang Agung Anggoro Federer dan Pratama Yuda Putra Ramdhan atas doa, cinta kasih, kesabaran, dan ketulusannya, serta Adik-adikku AKP Bayu Normansyah, SH. SIK. MH, Lettu. Inf. Wahyu Agung Romdany, Lettu. Inf. Moh. Maulana, Letda. Inf. Teguh Yuda Prakosa, , ST.Han, Letda. PNB. Chairul Akbar, ST.Han dan Ipda. Muhammad Resky Rizal, S.I.K. dan seluruh keluargaku yang selalu berdoa dan memberikan dukungan moril dan materiil, untuk kelancaran studiku hingga selesaiya penulisan tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan pihak-pihak terkait lainnya, tesis ini tidak akan terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Yth. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MBA, MM**, selaku Dosen Pembimbing I dan Tim Pengaji;
2. **Yth. Prof. I Made Widnyana, SH, MH**, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Ketua Tim Pengaji;
3. **Yth. Drs. Logan Siagian, MH** selaku Dosen Pembimbing II;
4. **Yth. Dr. Aditiawarman, SH, MH** selaku Tim Pengaji;
5. **Yth. Dr. Boy Nurdin, SH, MH** selaku Tim Pengaji;
6. **Yth. Muchtar Arifin, SH, MH** Mantan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah banyak memberikan dorongan dan bimbingan terhadap karir dan masa depan penulis serta **Ibu Non Muchtar** yang telah berjasa atas masa depan penulis selama ini.
7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. **Bapak Febrie Adryansah, SH, MH**, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Jawa Barat, yang telah banyak membantu baik moril maupun teril dalam penyusunan tesis ini.
9. **Bapak Hari Setiyono, SH**, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang selalu memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan Tesis ini.

10. Bapak **Asri Agung Putra, SH, MH**, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang telah banyak membantu baik moril maupun teril dalam penyusunan tesis ini.
11. Seluruh Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Rekan-rekan kerjaku di Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI (**Uni Erlina, Bang Yos, Rina Kirana**).
13. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan study ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, penulis harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Jakarta, Agustus 2013

Penulis,

SUMARDIN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis masalah yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang disidangkan dalam suatu peradilan *in absentia*, terutama berkenaan dengan masalah mengenai: 1). Bagaimana kekuatan nilai pembuktian dari alat-alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan secara *in absentia*? 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam hal adanya penyangkalan terhadap alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan secara *in absentia*? Metode Penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh data penelitian dilakukan dengan pendekatan teoritis dan normatif, dan untuk itu teknik pengumpulan data didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sementara itu analisis data penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan ketepatan dan kesesuaian data secara kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa: 1). Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan secara *in absentia* dapat mempengaruhi kekuatan nilai pembuktian pada pemeriksaan alat-alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemeriksaan alat-alat bukti tanpa keterangan terdakwa di sidang pengadilan adalah mencari fakta-fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga isi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu tanpa kehadiran terdakwa, terbukti kebenaran secara jelas dan meyakinkan. Begitu pula dengan alat bukti bukti petunjuk yang dapat diperoleh hakim tanpa alat bukti berupa keterangan terdakwa dapat mempengaruhi tingkat pembuktian tindak pidana korupsi yang bersifat "sah dan meyakinkan". 2). Bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam hal adanya penyangkalan terhadap alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan secara *in absentia* telah menjadi gugur demi hukum akibat dari ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan khususnya pemeriksaan alat-alat bukti dari suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, tanpa berakibat kepada gugurnya hak terdakwa untuk memperoleh putusan *in absentia* atas perkara tindak pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mempunyai saran, yaitu: 1). perlu ditingkatkan penguasaan dan pemahaman serta kemampuan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang melakukan tugas penegakan hukum dalam suatu peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi, terutama berkenaan dengan pengajuan alat-alat bukti yang mempunyai pembuktian yang bernilai kuat secara hukum pembuktian pidana, yaitu tanpa keraguan sehingga tingkat kekuatan pembuktian dapat bernilai "sah dan meyakinkan". 2). Perlu ada pengaturan secara tegas mengenai hak terdakwa tindak pidana korupsi dalam peradilan *in absentia* dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat diperoleh ketegasan atas eksistensi hukum dari peradilan *in absentia* dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak terdakwa, Pengadilan *in absentia*

ABSTRACT

This research aims to reveal and analyze issues relating to legal protection against the defendant's criminal corruption trial within a trial in absentia, especially with respect to issues concerning: 1). How does the strength of the evidentiary value of the evidence in corruption cases to be tried in absentia? 2). What are the forms of legal protection against the defendant in the corruption case of a denial of the evidence presented at trial in absentia?. Research methods used to obtain research data is by theoretical and normative approach, and the techniques for data collection based on library research in order to obtain data derived from primary legal materials, secondary and tertiary. While the analysis of research data is by considering the accuracy and appropriateness of qualitative data. The research concluded that: 1). The absence of the accused in the trial in absentia may affect the strength of evidentiary value on inspection evidence in corruption cases, in this case the examination of the evidence without the testimony of the defendant in the trial court is seeking legal facts to find the ultimate truth (material truth) about the events that actually occurred, so that the contents were indicted by the public prosecutor in absentia, proved the truth clearly and persuasively. Similarly, the proof of evidence hints that can be obtained without a judge evidence such as testimony of the defendant can affect the level of corruption evidence that is "legally and convincingly". 2). Forms of legal protection against the defendant in the corruption case of a denial of the evidence presented at trial in absentia has been killed by law due to the absence of the accused in the trial in particular examination of the pieces of evidence in a criminal act of corruption committed by the defendant , without resulting to the death of defendant's right to obtain a judgment in absentia for criminal cases that have been decided by a judge. The suggestion of research: 1). The needs of to be improved mastery and understanding and ability Prosecutors and Judges who perform law enforcement duties in a trial in absentia on corruption cases, especially with respect to the submission of evidence that have strong probative value in proving the criminal law, that is, without a doubt so the level of strength of evidence can be valuable "beyond reasonable doubt". 2). There needs to be regulation on the rights of the accused expressly corruption in the judiciary in absentia in the legislation so as to obtain of the existence of the law of justice in absentia especially to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords : Protection, right of the accused, Trial in absentia

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Kerangka Konseptual	28
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktianya	32
B. Pengertian dan Konsepsi Perlindungan Hukum.....	37
C. Hak-Hak Terdakwa Menurut KUHAP.....	47
D. Hak Terdakwa Menurut Undang-Undang di Bidang Tindak Pidana Korupsi...	53

BAB III KEKUATAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PADA PERADILAN IN ABSENTIA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

A. Peradilan <i>In Bbsentia</i>	53
B. Hukum Pembuktian Pidana Dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang di Bidang Tindak Pidana Korupsi.....	58
C. Ketidakhadiran Terdakwa Dan Kekuatan Nilai Pembuktian Dalam Pemeriksaan Alat-Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi	76

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN ALAT-ALAT BUKTI PADA PERADILAN IN ABSENTIA.

A. Hak Terdakwa Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Pada Peradilan <i>In Absentia</i>	86
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Hal Adanya Penyangkalan Terhadap Alat-Alat Bukti	97

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	105
B. SARAN	107

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN	114
------------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115
-----------------------------------	-----